

## **ABSTRAK**

**Fani Nolpiana Nadapdap 3203111036, “Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat dalam Pengimplementasian Peraturan Walikota Pematangsiantar No. 28 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.” Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengimplementasian Peraturan Walikota Pematangsiantar No. 28 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengelolaan sampah di Kota Pematangsiantar, khususnya di Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, yang mengalami kendala serius akibat tidak tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS) sejak dibongkarnya fasilitas tersebut karena pelebaran jalan. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, seperti meningkatnya pembuangan sampah sembarangan dan menurunnya efektivitas pengangkutan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah serta masyarakat dalam implementasi Peraturan Walikota Pematangsiantar No. 28 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, sekaligus mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya di tingkat kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, melalui teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informasi Penelitian adalah kelurahan dan masyarakat kelurahan Parhorasan Nauli yang berjumlah 11 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas, lemahnya pengawasan dan koordinasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Diperlukan pembangunan kembali TPS, peningkatan sosialisasi, dan pengawasan agar pelaksanaan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2018 lebih optimal. Selain itu, efektivitas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2018 masih rendah akibat kurangnya fasilitas, lemahnya pengawasan dan koordinasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

**Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Peraturan Walikota Pematangsiantar**

## **ABSTRACT**

**Fani Nolpiana Nadapdap 3203111036, "The Role of the Local Government and Community in Parhorasan Nauli Village, Siantar Marihat District, in the Implementation of Pematangsiantar Mayoral Regulation No. 28 of 2018 Concerning Waste Management." Department of Pancasila and Citizenship Education, Faculty of Social Sciences, State University of Medan.**

This study aims to analyze and evaluate the effectiveness of the role of local government and community in implementing Pematangsiantar Mayor Regulation No. 28 of 2018 concerning Waste Management in Parhorasan Nauli Village, Siantar Marihat District. This study is motivated by the problem of waste management in Pematangsiantar City, especially in Parhorasan Nauli Village, Siantar Marihat District, which has experienced serious obstacles due to the unavailability of Temporary Storage Sites (TPS) since the dismantling of these facilities due to road widening. This condition has caused various environmental problems, such as increased littering and decreased effectiveness of waste transportation to the Final Processing Site (TPA). The purpose of this study is to determine and analyze the role of local government and community in implementing Pematangsiantar Mayor Regulation No. 28 of 2018 concerning Waste Management, while evaluating the effectiveness of its implementation at the village level. This study uses a qualitative descriptive method with a normative-empirical approach, through data collection techniques in the form of literature studies, observations, interviews, and documentation. The research information is the sub-district and community of Parhorasan Nauli sub-district, totaling 11 people. The results of the study indicate that the role of local government and the community in waste management has not been effective. This is caused by a lack of facilities, weak supervision and coordination, and low public awareness. Reconstruction of TPS, increased socialization, and supervision are needed so that the implementation of Pematangsiantar Mayor Regulation Number 28 of 2018 is more optimal. In addition, the effectiveness of the implementation of Pematangsiantar Mayor Regulation Number 28 of 2018 is still low due to a lack of facilities, weak supervision and coordination, and low public awareness.

**Keywords: Waste Management, Pematangsiantar Mayoral Regulation**